

Isu Hak Asasi Manusia dalam Penanggulangan HIV: Kajian Literatur 2015-2025

Adhitya Chandra Setyawan¹, Dian Tri Febriana¹, Ade Armada Sutedja¹, Made Krisna Wardana²

¹ Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum, Jombang

² Städtisches Klinikum Wolfenbüttel, Deutschland

ABSTRACT

Background of Study : *The challenges in implementing human rights (HAM) in HIV prevention are still significant, marked by discrimination against people living with HIV/AIDS (PLWHA), pregnant women, sex workers, drug users, and the LGBTQ+ community. Repressive policies and the lack of participation of affected communities make HIV prevention interventions less effective and non-inclusive. This study aims to analyze the integration of human rights principles in HIV policies in Indonesia and identify challenges and opportunities in their implementation to ensure fair and equal access to services.*

Methods : *The method used was a Systematic Literature Review (SLR) by analyzing scientific publications related to Human Rights (HAM) issues in HIV prevention in the period 2015–2025. Data sources were obtained from databases such as Scopus, PubMed, Google Scholar, and ScienceDirect with specific keywords such as “HIV and Human Rights” and “harm reduction.” Inclusion criteria include empirical or conceptual articles in English, Arabic, or Indonesian that are relevant to human rights and HIV, while the analysis was carried out thematically through a content analysis approach to highlight patterns, challenges, and policy recommendations.*

Results : *The results of the study show that the criminalization approach to HIV actually worsens stigma and hinders access to health services, especially for vulnerable groups. In contrast, a human rights-based approach that ensures equal access and involves communities has proven to be more effective in reducing HIV transmission rates. Human rights violations, such as privacy, health, and discrimination, are major obstacles, so human rights-based policy reform is urgently needed.*

Conclusion : *A human rights-based approach that ensures equal access and involves communities has proven to be more effective in tackling HIV than a criminalization approach that actually exacerbates stigma and hinders health services.*

Keywords : *HIV Prevention, Human Rights, Literature Review*

Korespondensi: Adhitya Chandra Setyawan, Program Studi Magister Kesehatan Masyarakat, Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum, Jombang, Jawa Timur, Indonesia, 081333848108, adhitya.c.setyawan@gmail.com

PENDAHULUAN

Tantangan dalam penerapan HAM dalam penanggulangan HIV masih cukup besar (Piot dkk, 2015). Praktik diskriminasi sejauh ini banyak terjadi, terutama pada kaum atau kondisi minoritas. Bentuk praktik diskriminasi di bedakan menjadi praktik diskriminasi langsung dan praktik diskriminasi tidak langsung. Bentuk praktik diskriminasi langsung menurut teori ialah perlakuan yang kurang menguntungkan terhadap seseorang karena memiliki karakteristik yang dilindungi (*protected characteristic*) dibanding orang lain dalam kondisi yang serupa, sedangkan praktik diskriminasi menurut teori ialah kebijakan, kriteria, atau praktik yang tampak netral tetapi memiliki efek merugikan yang tidak proporsional terhadap kelompok tertentu yang memiliki karakteristik dilindungi (Campbell dan Smith, 2022). Praktik diskriminatif terhadap ODHA (Orang dengan HIV/AIDS) (Andrianto, 2021), terdapat 78,9% responden penelitian menunjukkan perilaku diskriminatif terhadap ODHA di Indonesia (Nursalam dkk, 2021), 68,9% dari 21.838 responden dilaporkan menunjukkan diskriminasi terhadap ODHA

(Sadarang, 2022), perempuan hamil (Gunawansyah, Yunindyawati dan Sununianti, 2020), pekerja seks (Saputra, 2023), pengguna narkoba (Mapiah, 2024), komunitas LGBTQ+ (Tambunan dan Pratama, 2025), masih terjadi baik di layanan kesehatan maupun dalam kebijakan publik. Kebijakan yang masih bersifat represif misalnya pada tes HIV wajib tanpa informed consent, pemantauan ketat tanpa perlindungan kerahasiaan, atau sanksi administratif terhadap ODHA. Selain dan minimnya keterlibatan ODHA, LSL, pekerja seks, dan kelompok terdampak lain tidak diberi ruang memberi masukan dalam penyusunan kebijakan, sehingga kebijakan tidak sesuai kebutuhan lapangan.

Isu HAM menjadi aspek penting dalam penanggulangan HIV global, mengingat HIV bukan hanya masalah medis, tetapi juga sosial dan struktural. Pendekatan berbasis HAM menekankan martabat dan hak individu, khususnya kelompok rentan yang mengalami diskriminasi. Kebijakan represif terhadap pengguna narkoba, pekerja seks, dan komunitas LGBTQ+ justru menghambat akses layanan. Karena itu, pendekatan berbasis HAM dinilai efektif dalam menjangkau populasi marginal dan memastikan layanan yang adil dan setara.

Sebagian besar penelitian HIV di Indonesia masih berfokus pada aspek medis, sementara dimensi hak asasi manusia (HAM) belum banyak dikaji. Penelitian ini menawarkan pendekatan analitis interdisipliner yang menilai integrasi prinsip-prinsip HAM dalam kebijakan dan praktik penanggulangan HIV menggunakan kerangka HAM sebagai alat evaluasi. Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi tingkat integrasi HAM, tantangan, dan peluang untuk menjamin akses layanan HIV yang adil dan setara bagi semua kelompok masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode *Systematic Literature Review* (SLR) untuk mengkaji isu HAM dalam penanggulangan HIV (2015-2025) melalui pencarian dan evaluasi artikel dari berbagai basis data ilmiah Scheibe dkk (2020). Dalam proses skrining literatur, dilakukan pencarian melalui basis data elektronik seperti Scopus, PubMed, Google Scholar, dan ScienceDirect dengan fokus pada isu hak asasi manusia (HAM) dalam penanggulangan HIV pada periode 2015-2025. Pertanyaan dalam penelitian ini: 1) Bagaimana kriminalisasi dan dampak terhadap penanggulangan HIV?, 2) Bagaimana pelanggaran HAM dalam akses layanan HIV?, 3) Bagaimana ketidakterpaduan pendekatanHAM dalam kebijakan HIV?, 4) Bagaimana peran komunitas dalam respons berbasis HAM terhadap HIV?, 5) Apakah tantangan dan peluang reformasi kebijakan HIV berbasis HAM?. Penelitian ini menggunakan kriteria inklusi berupa: 1) artikel berbahasa Inggris (18.400), Arab (7), atau Indonesia (6.860), terbit antara 2015-2025, 2) membahas isu HAM dalam konteks HIV, serta 3) merupakan studi empiris atau kajian konseptual dari jurnal ilmiah atau laporan organisasi internasional. Kriteria eksklusi mencakup: 1) artikel klinis tanpa kaitan HAM, 2) tanpa teks lengkap, atau berupa opini tanpa referensi ilmiah. Data dikumpulkan melalui pencarian kata kunci terkait HIV dan HAM, lalu dianalisis secara tematik menggunakan analisis isi untuk mengidentifikasi tema, pendekatan kebijakan, tantangan HAM, serta dampaknya terhadap layanan HIV.

HASIL PENELITIAN

Berlandaskan ratusan artikel yang ditemukan, dilakukan seleksi ketat berdasarkan relevansi, metode penelitian, dan kualitas akademik hingga diperoleh 20 studi utama yang memenuhi kriteria. Studi tersebut meliputi kajian literatur, normatif yuridis, studi kualitatif, dan *mixed-method* yang secara konsisten menunjukkan bahwa pendekatan kriminalisasi HIV tidak efektif dan justru memperparah stigma serta hambatan akses layanan kesehatan. Sebaliknya, integrasi

prinsip HAM dan partisipasi komunitas rentan terbukti memperbaiki respons HIV secara signifikan.

Tabel 1. Hasil Studi Pendahulu

Judul	Peneliti	Tahun	Metode	Hasil
Refleksi tentang kesehatan masyarakat dan hak asasi manusia dalam kriminalisasi risiko AIDS: Tinjauan bukti empiris asing dan analisis keputusan pengadilan Taiwan	Lin, Hsin-rou	2024	Kajian literatur	Hukum kriminalisasi HIV di Taiwan tidak efektif mengurangi perilaku risiko dan menimbulkan kekhawatiran terhadap akses layanan Kesehatan.
Persyaratan hak asasi manusia terkait orang yang hidup dengan AIDS'	Ehsanpour, S.R. dan Karami, H	2020	Kajian normatif yuridis	Penderita HIV/AIDS memiliki hak yang harus dijamin negara tanpa diskriminasi
<i>What will it take to achieve the sexual and reproductive health and rights of women living with HIV</i>	Dunaway Dkk.	2022	Kajian literatur	Respons HIV yang etis dan efektif harus melibatkan perspektif serta kepemimpinan perempuan yang hidup dengan HIV
<i>Law, criminalisation and HIV in the world: have countries that criminalise achieved more or less successful pandemic response?</i>	Kavanagh Dkk.	2021	Kajian literatur	Kriminalisasi perilaku tertentu menurunkan capaian HIV, sementara perlindungan hak meningkatkan status pengetahuan dan supresi virus
<i>Under threat: the International AIDS Society-Lancet Commission on Health and Human Rights</i>	Beyrer Dkk.	2024	Kajian literatur	Deklarasi Universal HAM menginspirasi kemajuan dalam dekolonisasi dan pengakuan hak kelompok rentan meskipun masih menghadapi tantangan realisasi
<i>Manifestation and Marking of HIV Stigma in Indonesia: A Scoping Review</i>	Sudastrri Dkk.	2025	Scoping review	Stigma HIV di Indonesia muncul dalam berbagai bentuk dan terjadi di berbagai tingkat masyarakat, memerlukan intervensi lintas sektor
<i>A comparative human rights analysis of laws and policies for adolescent contraception in Uganda and Kenya</i>	Perehudoff Dkk.	2022	Kajian literatur	Kebijakan Kenya lebih konsisten dengan rekomendasi WHO dibanding Uganda, namun keduanya masih perlu perbaikan
<i>Human rights, public health and COVID-19 in Canada</i>	Mykhalovsky Dkk.	2020	Kajian literatur	Respons <i>Covid-19</i> di Kanada perlu lebih selaras dengan bukti ilmiah dan standar hak asasi manusia
<i>HIV/AIDS/SIDA (MVHA): revisão integrativa à luz dos direitos humanos</i>	Grubba	2024	Kajian literatur	Literatur ilmiah Brasil membahas HIV dalam perspektif hak asasi manusia melalui dua tema utama: pencegahan dan intervensi perawatan
<i>Vulnerability, Care, and integrity: conceptual reconstructions and current challenges for HIV/AIDS care policies and practices</i>	Ayres	2023	Kajian literatur	Pendekatan berbasis kerentanan, perawatan, dan integralisme penting untuk melawan tantangan dalam respons HIV/AIDS di Brasil
<i>Lessons from HIV to Guide COVID-19 Responses in the Central African Republic</i>	Somse dan Eba	2020	Studi kualitatif-deskriptif	Penanganan <i>Covid-19</i> harus mengadopsi pendekatan berbasis hak asasi dan pelajaran dari respons HIV
<i>Intimate Partner Violence, Human Rights Violations, and HIV among Women in Nairobi, Kenya</i>	Andrews Dkk.	2020	Mixed-method	Kekerasan oleh pasangan intens memperburuk pengelolaan HIV pada perempuan di Kenya
<i>Assessing a Human Rights-Based Approach to HIV in Kenya</i>	Sircar Dkk.	2019	Studi kualitatif	Akan mengungkap bagaimana strategi HIV Kenya diterapkan dan dampaknya terhadap hak asasi manusia kelompok rentan

<u><i>Law, Human Rights, and Pandemic Response: Reflecting on the South African HIV Response 25 Years Later</i></u>	Sekalala dan Esom	2024	Kajian literatur	Pengumuman akhir pandemi <i>Covid-19</i> berisiko mengurangi perhatian terhadap ketimpangan sosial dan tantangan kesehatan di Afrika Selatan
<u><i>Protection of human rights and barriers for people with HIV/AIDS in Colombia: an analysis of the legal framework</i></u>	Parra-Barrera Dkk.	2022	Kajian literatur	Regulasi HIV/AIDS ada, tapi pelanggaran hak pasien masih terjadi di Kolombia (Parra-Barrera, dkk., 2022a).
<u><i>The HIV epidemic in Latin America: a time to reflect on the history of success and the challenges ahead</i></u>	Crabtree-Ramírez Dkk.	2020	Kajian literatur	HIV di Amerika Latin terkendali tapi belum capai target 90-90-90 dan dipengaruhi oleh stigma, migrasi, dan kebijakan
<u><i>Ending unjust HIV criminalization: leave no-one behind</i></u>	Bernard Dkk.	2021	Kajian literatur	Hukum kriminalisasi HIV masih luas dan diskriminatif, menghambat akses dan menimbulkan pelanggaran hak bagi orang hidup dengan HIV
<u><i>Human rights of people living with HIV, men with diverse sexualities and transgender women in PNG</i></u>	Leach	2021	Studi kualitatif	Komunitas Papua Nugini dengan HIV dan gender beragam mengalami pelanggaran hak, namun organisasi lokal berperan aktif mempromosikan hak mereka
<u><i>Bringing sex workers to the centre of the HIV response</i></u>	Das dan Horton	2015	Kajian literatur	<i>Sex workers</i> menghadapi risiko HIV tinggi akibat stigma, diskriminasi, dan kriminalisasi yang menghambat akses layanan
<u><i>Human rights and access to hepatitis C treatment for people who inject drugs</i></u>	Wolfe Dkk.	2015	Literatur	Barriers akses pengobatan HCV pada PWID terkait pelanggaran hak, perlu reformasi termasuk dekriminalisasi dan penghapusan diskriminasi

PEMBAHASAN

Pembahasan ini mengkaji isu hak asasi manusia (HAM) dalam penanggulangan HIV berdasarkan kajian literatur terkini antara tahun 2015 hingga 2025. Fokus utama pembahasan meliputi dampak kriminalisasi terhadap kelompok rentan, pelanggaran HAM dalam akses layanan kesehatan, serta peran komunitas dan pentingnya reformasi kebijakan berbasis HAM.

Kriminalisasi dan Dampaknya terhadap Penanggulangan HIV

Penanggulangan HIV menghadapi tantangan kompleks akibat stigma sosial dan kriminalisasi kelompok rentan seperti pekerja seks, pengguna narkoba suntik, dan komunitas LGBTQ+, yang menghambat akses layanan kesehatan dan memperburuk penyebaran HIV (Putrie dan Prasetya, 2021). Hak asasi manusia (HAM) menegaskan hak setiap individu atas layanan kesehatan tanpa diskriminasi (Putri dkk, 2023). Kriminalisasi perilaku berisiko menghalangi program pengurangan dampak buruk seperti pertukaran jarum suntik (Kumalasari, Chastanti dan Siregar, 2020). Pendekatan *harm reduction* dan reformasi kebijakan berbasis HAM penting untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan HIV secara global melalui koordinasi internasional (Kurniaty, 2021).

Hal ini sejalan dengan berbagai penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa negara yang mempersepsikan HIV sebagai ancaman sering kali gagal menekan penyebarannya dan justru memperburuk situasi (Kavanagh dkk, 2021). Lin, Hsin-rou (2024), berpendapat kriminalisasi HIV berdampak negatif pada kesehatan publik. Hal ini dikarenakan perilaku dari pasien HIV cenderung menyembunyikan infeksi yang berpotensi terjadinya penyebaran virus. Bernard dkk (2021), mengungkapkan jika tindakan kriminal dari HIV dapat berdampak pada penderita HIV, yang membuat penderita enggan untuk melakukan tes atau kontrol dalam melakukan pengobatan. Beyrer dkk (2024), menyatakan bahwa lingkungan yang memiliki aturan atau

hukum yang ketat dan tetap dapat mengontrol serta menghentikan penyebaran HIV. Crabtree-Ramírez dkk (2020), kriminalisasi di Amerika Latin yang terjadi terhadap kelompok kunci dalam mengancam kemajuan pengendalian HIV karena membuat mereka enggan mengakses layanan. Tindakan ini dikarenakan keengganan masyarakat dalam melakukan pengecekan serta keterbukaan atas infeksi HIV yang di derita, yang bisa mengancam pada peningkatan dalam penanggulangan.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Das dan Horton (2015), mengungkapkan pekerja seks yang sering dikriminalisasi, meningkatkan kerentanan mereka terhadap HIV. Terjadinya ketidak-adilan dan dikucilkan bagi pekerja seks komersial selama proses pengecekan, menyebabkan mereka enggan dalam melakukan pengecekan terutama pengecekan rutin akan kesehatan. Keengganan yang terjadi akan mengakibatkan tidak dapat terkontrolnya penderita HIV dalam dilakukan pencegahan dan pengobatan yang berdampak pada kerentanan penyebaran dan terjangkitnya infeksi HIV. Menurut Kumalasari, Chastanti dan Siregar (2020), pendekatan represif terhadap konteks narkoba membuat siswa takut mencari bantuan layanan, sehingga meningkatkan risiko terjadi penyebaran HIV. Parra-Barrera dkk (2022), juga menemukan bahwa ketentuan hukum di Kolombia mensyaratkan deklarasi status HIV dalam konteks pekerjaan tertentu. Ketentuan hukum di Kolombia secara tidak langsung mengkriminalisasi ODHA, misalnya dengan mensyaratkan pelaporan status HIV untuk pekerjaan tertentu, yang membuat banyak ODHA enggan melakukan tes atau mengakses layanan. Kondisi tersebut memperlambat deteksi dini dan pengobatan HIV, sehingga menciptakan efek kriminalisasi terselubung yang membuat ODHA enggan tes HIV.

Sekalala dan Esom (2024), menyatakan kriminalisasi HIV di Afrika Selatan pada awal masa epidemi mengurangi stigma dan menghalangi tes. Pendekatan kriminalisasi terhadap HIV ini justru meningkatkan stigma dan ketakutan untuk mencari tes atau pengobatan sehingga pendekatan ini dianggap menurunkan efektivitas penanggulangan HIV. Wolfe dkk (2015), menyebutkan bahwa kriminalisasi terhadap pengguna narkoba membuat mereka takut mengakses layanan kesehatan, termasuk terapi HIV. Ketakutan akan penangkapan saat mencari layanan kesehatan menjadi hambatan serius, terutama bagi pengguna narkoba yang juga hidup dengan HIV.

Pelanggaran HAM dalam Akses Layanan HIV

Hak atas kesehatan adalah bagian fundamental HAM yang menjamin hidup bermartabat dan bebas diskriminasi (Putri dkk, 2023). Dalam konteks HIV, kelompok rentan seperti pekerja seks, pengguna narkoba, dan komunitas LGBTQ+ sering menghadapi diskriminasi dan pelanggaran privasi, menghambat akses layanan kesehatan. Kriminalisasi perilaku berisiko memperkuat stigma dan ketakutan, sehingga menghalangi diagnosis dan pengobatan. Pendekatan berbasis HAM menekankan partisipasi komunitas terdampak untuk intervensi yang lebih efektif dan responsif. Reformasi kebijakan yang menghapus diskriminasi dan kriminalisasi serta menyediakan layanan inklusif sangat penting untuk mengendalikan epidemi HIV secara adil dan berkelanjutan.

Hal ini sejalan dengan berbagai penelitian sebelumnya yaitu Dunaway, Brion, Hale, Alesi, Assan, Chung, Moroz, Namiba, Ouma, Owomugisha, dkk (2022), terjadinya diskriminasi pada perempuan berbasis gender & HIV yang membatasi hak atas kesehatan reproduksi. Penderita HIV perempuan lebih sering dianggap tidak penting dan cenderung menghadapi pelanggaran dan penolakan atas haknya dalam memperjuangkan kesehatan seksual dan reproduksinya. Menurut penelitian Kavanagh dkk (2021), terdapatnya kriminalisasi atas pelanggaran HAM berakibat memperburuk terjadinya diskriminasi, sehingga yang berdampak

pada melemahnya akses dan pengobatan pada layanan HIV. Kriminalisasi memicu diskriminasi & pelanggaran hak atas layanan kesehatan penderita HIV. Sudastrri, Wulandari dan Januraga (2025), menjelaskan bahwa stigma menjadi hambatan akses layanan (pelanggaran kesetaraan hak). Stigma atau pendapat ini muncul karna adanya penolakan layanan kesehatan serta terjadinya diskriminasi yang dilakukan oleh penyedia layanan. Ehsanpour, S.R. dan Karami, H (2020), menyatakan bahwa pelanggaran HAM dalam akses layanan kesehatan menjadi masalah utama bagi penyandang HIV. Kondisi ini menciptakan ketidakadilan layanan dan mempersempit ruang bagi ODHA untuk memperoleh hak kesehatan yang layak. Lin, Hsinrou (2024), menambahkan bahwa stigma dan ketakutan menyebabkan ODHA menjadi enggan mencari pengobatan. Kriminalisasi semakin memperburuk keadaan karena mendorong ODHA menghindari tes atau terapi akibat kekhawatiran terhadap pelanggaran hak kesehatannya. Bernard dkk (2021), menyatakan bahwa hukum pidana terhadap HIV kerap dilakukan dengan cara yang melanggar hak asasi manusia. Hukum yang mengkriminalkan ODHA tidak dapat menurunkan angka penularan tetapi justru meningkatkan stigma dan menghambat penanggulangan HIV.

Penelitian Beyrer dkk (2024), menyebutkan bahwa penolakan layanan kesehatan terhadap penderita HIV masih terjadi dan mencerminkan pelanggaran hak kesehatan. Crabtree-Ramírez dkk (2020), menegaskan bahwa diskriminasi dan hambatan struktural membatasi akses kelompok marginal terhadap layanan HIV. Das dan Horton (2015), menyebutkan bahwa pekerja seks kerap mengalami kekerasan dan penolakan layanan Kesehatan, sementara Andrews dkk (2020), mengemukakan bahwa kekerasan pasangan intim membatasi akses perempuan terhadap layanan HIV. Temuan ini menegaskan bahwa pelanggaran HAM masih menghambat pemenuhan hak kesehatan bagi populasi terdampak HIV.

Grubba (2024), menyebutkan diskriminasi dan stigmatisasi masih marak di layanan kesehatan. Leach, (2021), menyebutkan stigma dan diskriminasi yang tinggi dari penyedia layanan kesehatan menyebabkan banyak ODHA tidak mendapat layanan yang layak. Kriminalisasi juga menimbulkan rasa takut sehingga menghambat pencegahan dan pengobatan HIV. Mykhalovskiy dkk (2020), menemukan bahwa respon pandemi yang terlalu mengutamakan keamanan publik kerap mengabaikan hak atas kesehatan ODHA termasuk pembatasan layanan isolasi paksa. Selain itu, Perehudoff dkk (2022), menunjukkan bahwa remaja sering ditolak akses kontrasepsi dan layanan kesehatan reproduksi karena norma hukum yang membatasi. Penipuan terhadap akses kontrasepsi bagi remaja di Uganda dan Kenya merupakan bentuk pelanggaran HAM yang dapat meningkatkan kerentanan terhadap HIV, bentuk pelanggaran HAM ini juga berdampak pada pencegahan HIV.

Diskriminasi di fasilitas kesehatan membuat banyak ODHA kehilangan akses layanan (Sircar, Saoyo dan Maleche, 2019). Somse dan Eba (2020), menegaskan bahwa pengabaian hak-hak pada kelompok rentan menumbuhkan ketidakpercayaan terhadap layanan kesehatan. Parra-Barrera dkk (2022), melaporkan masih tingginya pelanggaran kerahasiaan dan penolakan persetujuan pelayanan kesehatan. Hal ini merupakan bentuk pelanggaran HAM dan masih terjadi secara luas di Kolombia. Sekalala dan Esom (2024), menemukan bahwa perempuan, pekerja seks, dan pengguna narkoba sering ditolak akses layanan HIV. Banyak kelompok rentan (perempuan, pengguna narkoba, pekerja seks) mengalami diskriminasi dalam akses layanan HIV, yang merupakan pelanggaran HAM mendasar. Wolfe dkk (2015), juga mencatat banyak fasilitas kesehatan enggan merawat pengguna narkoba yang hidup dengan HIV. Temuan-temuan tersebut menegaskan bahwa diskriminasi dan pelanggaran

HAM masih menjadi hambatan serius dalam akses layanan HIV.

Ketidakterpaduan Pendekatan HAM dalam Kebijakan HIV

Ketidakterpaduan pendekatan HAM dalam kebijakan HIV mencerminkan kegagalan struktural dalam mengakui kesehatan sebagai hak dasar (Putri dkk, 2023). Banyak kebijakan masih berfokus pada pendekatan biomedis, mengabaikan prinsip nondiskriminasi, akses setara, dan partisipasi komunitas. Kelompok rentan seperti pekerja seks, pengguna narkoba, dan komunitas LGBTQ+ justru dikriminalisasi dan distigmatisasi, memperburuk akses layanan. Pendekatan represif terbukti tidak efektif dan melanggar hak individu. Sebaliknya, integrasi prinsip HAM meningkatkan partisipasi komunitas, memperluas akses, serta mengurangi stigma dan diskriminasi, menuju sistem kesehatan yang lebih adil dan responsif.

Sejumlah penelitian sebelumnya secara konsisten yaitu Kavanagh dkk (2021), menyebut kebijakan terlalu legalistik dan mengabaikan HAM. Undang-undang kesehatan masyarakat sering kali mengabaikan prinsip-prinsip hak asasi manusia, sehingga menciptakan respons yang terbagi menjadi beberapa bagian atau dibeda-bedakan. Ehsanpour, S.R. dan Karami, H (2020), menyoroti beberapa regulasi nasional bertentangan dengan prinsip HAM. Kebijakan yang ada, tidak sesuai dengan prinsip-prinsip HAM sehingga menimbulkan diskriminasi pada pasien HIV. 林欣柔 (2024), menyebut regulasi masih represif & tidak berpihak HAM. Kebijakan yang dikeluarkan terhadap penderita HIV kurang sesuai dengan pendapat dan ketidak paduan sesuai pendekatan HAM. Bernard dkk (2021), menyatakan kebijakan yang telah diterapkan mengenai HIV tidak sejalan dengan ketetapan yang yang ditentukan sesuai dengan mempertimbangkan HAM bagi masyarakat. Ada kegagalan terus-menerus dalam mengintegrasikan prinsip HAM ke dalam hukum dan kebijakan HIV.

Das dan Horton (2015), menyebutkan strategi HIV jarang mengintegrasikan pendekatan berbasis hak bagi pekerja seks. Pendekatan dalam penerapan kebijakan bagi penderita HIV pekerja seks sering terjadi kelalaian dikarenakan tidak adanya peraturan yang tegas mengenai hak asasi manusia terutama bagi penderita HIV. Leach (2021), menunjukka bahwa kebijakan nasional belum mengintegrasikan prinsip HAM untuk kelompok minoritas seksual. Sircar, Saoyo dan Maleche (2019), adanya ketidaksesuaian antara jaminan HAM dalam konstitusi Kenya dan pelaksanaan kebijakan HIV. Parra-Barrera dkk (2022), mengatakan meskipun ada perlindungan HAM secara hukum, penerapannya dalam kebijakan HIV masih terbatas. Secara umum, terdapat kesenjangan antara komitmen hak asasi manusia yang tertulis dalam hukum dan implementasi nyata di lapangan.

Peran Komunitas dalam Respons Berbasis HAM terhadap HIV

Hak asasi manusia (HAM) menjadi dasar penting dalam penanggulangan HIV, menekankan perlunya sistem kesehatan yang adil, inklusif, dan bebas diskriminasi (Aswandi dan Roisah, 2019). Komunitas terdampak HIV memiliki peran vital dalam respons berbasis HAM karena mereka memahami langsung tantangan seperti stigma dan hambatan akses layanan. Pendekatan ini menuntut partisipasi bermakna komunitas dalam pembuatan kebijakan dan layanan, serta mendorong pendidikan kesehatan berbasis komunitas. Dengan begitu, komunitas dapat meningkatkan kesadaran, mendukung akses setara terhadap layanan, dan menciptakan lingkungan yang lebih menerima bagi individu dengan HIV.

Hal ini sejalan dengan penelitian Dunaway, Brion, Hale, Alesi, Assan, Chung, Moroz, Namiba, Ouma, Owomugisha, dkk (2022), yang menekankan pada kebijakan HIV masih minim integrasi HAM gender. Jaringan komunitas khususnya perempuan yang hidup dengan HIV, telah berperan penting dalam memperjuangkan hak-hak mereka. Kavanagh dkk (2021)

serta Sudastri, Wulandari dan Januraga (2025) menunjukkan bahwa pelibatan komunitas berdampak dalam penyusunan kebijakan masih terbatas, padahal intervensi berbasis komunitas terbukti mampu mengurangi stigma dan meningkatkan akses layanan Ehsanpour, S.R. dan Karami, H (2020), menekankan perlunya partisipasi aktif kelompok terdampak, sementara Bernard dkk (2021), menyoroti peran komunitas dalam menentang hukum yang tidak adil. Beyrer dkk (2024), menekankan perlunya perlindungan terhadap masyarakat sipil agar respons HIV yang dipimpin komunitas dapat berjalan efektif. Selain itu, Crabtree-Ramírez dkk (2020), menyebutkan jaringan komunitas berperan penting dalam menjaga akses selama krisis.

Das dan Horton (2015), menekankan pentingnya organisasi pekerja seks dalam respons HIV karena mereka memahami langsung permasalahan yang dihadapi komunitas. Lin, Hsinrou (2024), menyoroti peran sekolah dan komunitas dalam edukasi narkoba dan HIV yang berbasis hak. Keterlibatan siswa dalam edukasi narkoba membentuk pemahaman komunitas terhadap isu kesehatan dan pencegahan terjangkitnya infeksi HIV. Andrews dkk (2020), menyebutkan kelompok pendukung komunitas perempuan diperlukan untuk mengatasi hambatan layanan. Menekankan perlunya pemberdayaan komunitas perempuan dan kelompok pendukung lokal untuk membantu korban kekerasan agar tetap bisa mengakses layanan HIV, sedangkan Ayres (2023) dan Grubba (2024), menyebutkan peran jaringan komunitas serta organisasi masyarakat diperlukan sebagai pendukung yang memperhatikan aspek kerentanan sosial dan emosional ODHA dalam layanan HIV dan mendorong pemerintah agar mengintegrasikan HAM dalam program HIV.

Leach (2021), menyoroti bahwa organisasi berbasis komunitas menjadi satu-satunya ruang aman untuk kelompok rentan serta berperan menutup celah layanan negara, sehingga keterlibatan komunitas LGBTQ dan ODHA dalam penyusunan kebijakan sangat penting untuk memastikan respons yang inklusif. Pehudoff dkk (2022), Sircar, Saoyo dan Maleche (2019), dan Somse dan Eba (2020) sama-sama menunjukkan bahwa organisasi remaja, LSM, dan jaringan komunitas ODHA berperan krusial dalam menekan pemerintah agar menghormati HAM dan memperkuat efektivitas respons HIV. Sekalala dan Esom (2024) dan Wolfe dkk (2015) juga menyebutkan pentingnya peran aktivisme komunitas dan keterlibatan organisasi pengguna narkoba, dalam mendorong pemerintah mengubah pendekatan menjadi pendekatan berbasis pada HAM dan menekan pemerintah agar menghapus hambatan akses layanan.

Tantangan dan Peluang Reformasi Kebijakan HIV Berbasis HAM

Reformasi kebijakan HIV berbasis HAM menghadapi tantangan diskriminasi terhadap kelompok rentan dan pendekatan hukum yang represif, namun juga membuka peluang besar untuk perubahan positif. HAM menjamin setiap individu, tanpa diskriminasi, mendapat layanan kesehatan yang bermartabat. Reformasi ini menekankan pentingnya partisipasi komunitas terdampak dalam penyusunan kebijakan, guna menciptakan layanan yang relevan dan inklusif. Pendekatan berbasis HAM memperkuat sistem kesehatan yang adil, mengurangi stigma, dan mendorong solidaritas sosial. Selain itu, reformasi ini mendorong perubahan struktural, memastikan prinsip HAM diterapkan oleh tenaga medis dan institusi kesehatan (Aswandi dan Roisah, 2019).

Hal ini sejalan dengan berbagai kajian sebelumnya yang menyebutkan kebijakan HIV harus mengintegrasikan perlindungan dari kekerasan berbasis gender Andrews dkk (2020). Ayres (2023), menyatakan kebijakan HIV harus melampaui aspek medis dan mengintegrasikan dimensi sosial serta HAM hal ini agar tidak hanya fokus pada medis, tetapi

juga memperhatikan aspek sosial, HAM, dan kesejahteraan secara menyeluruh. Dunaway, dkk (2022), juga menyatakan perlunya reformasi kebijakan agar respons HIV berbasis hak gender & inklusif. Reformasi hukum dan kebijakan yang jelas diperlukan untuk menyelaraskan sistem kesehatan dengan standar hak asasi manusia bagi penderita HIV tanpa adanya perbedaan jenis kelamin. Grubba (2024), juga menyoroti perlu reformasi hukum agar kebijakan HIV selaras dengan prinsip HAM.

Kavanagh dkk (2021) dan Leach (2021), menunjukkan bahwa dekriminialisasi, termasuk terhadap sesama jenis, membuka peluang bagi strategi kesehatan masyarakat yang lebih efektif dan berbasis HAM. Mykhalovskiy dkk (2020), menyebutkan diperlukan reformasi kebijakan yang menjamin perlindungan HAM bahkan dalam keadaan darurat Kesehatan agar kesalahan masa lalu tidak terulang. Pehudoff dkk (2022) dan Sircar, Saoyo dan Maleche (2019), menyoroti peluang harmonisasi hukum nasional dengan norma HAM internasional untuk menjamin agar respon HIV lebih efektif, akan tetapi pemberian perijinan reformasi hukum untuk mencabut pasal-pasal kriminalisasi HIV dan menggantinya dengan pendekatan kesehatan publik berbasis HAM. Somse dan Eba (2020), mengatakan perlu reformasi kebijakan kesehatan yang menjamin partisipasi komunitas dan perlindungan HAM. Peluang dalam memperkuat HAM dalam kebijakan masa depan, menekankan pada adanya reformasi hukum agar kebijakan HIV konsisten dengan standar HAM internasional dan lebih pro-komunitas.

Sudastrri, Wulandari dan Januraga (2025), menekankan perlu adanya revisi tentang kebijakan HIV agar berbasis HAM dan anti-stigma dengan melibatkan masyarakat untuk mengatasi stigma sistemik yang dapat diterima semua pihak sehingga terjaminnya hak dari penderita HIV untuk dapat terbuka. Ehsanpour, S.R. dan Karami, H (2020) dan Lin, Hsin-rou (2024), mendorong harmonisasi hukum nasional dengan standar HAM internasional dan menyeimbangkan kesehatan publik dan HAM. Hal ini akan menjadi bukti bahwa HAM dapat berlaku untuk semua orang termasuk dalam kebijakan penindakan HIV. Bernard dkk (2021) dan Beyrer dkk (2024) menegaskan pentingnya reformasi hukum harus untuk menyelaraskan tanggapan terhadap HIV dengan prinsip-prinsip HAM serta mendorong advokasi global guna memperkuat perlindungan HAM bagi penderita infeksi HIV.

Crabtree-Ramírez dkk (2020), menyatakan bahwa reformasi hukum dan kebijakan diperlukan untuk mengatasi ketimpangan struktural dan hambatan hukum dalam kebijakan kemajuan HIV agar berkelanjutan. Das dan Horton (2015), juga mengatakan reformasi hukum untuk melindungi hak-hak pekerja seks dapat mengubah dampak HIV secara signifikan. Dekriminalisasi dan perlindungan hak bagi semua pihak termasuk pekerja seks komersial merupakan langkah kunci dalam reformasi kebijakan HIV. Parra-Barrera dkk (2022), menekankan pentingnya harmonisasi hukum untuk memperkuat mekanisme pengawasan dan penegakan HAM, serta memastikan kebijakan yang lebih berpihak pada ODHA. Sekalala dan Esom (2024), menggarisbawahi pentingnya pembelajaran reformasi masa lalu untuk merancang hukum dan kebijakan kesehatan yang lebih inklusif dan berbasis HAM di masa mendatang. Sementara itu, Wolfe dkk (2015), menekankan perlunya reformasi hukum yang mengedepankan pendekatan berbasis kesehatan dan HAM, bukan pendekatan pidana.

SIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan kriminalisasi terhadap HIV dan kelompok rentan memperburuk penanggulangan epidemi, karena memicu stigma, diskriminasi, dan ketakutan yang menghambat akses layanan kesehatan. Pelanggaran HAM, seperti hak atas privasi dan kesehatan, memperparah marginalisasi. Sebaliknya, pendekatan

berbasis HAM yang menghapus kriminalisasi dan menjamin akses setara, serta melibatkan komunitas terdampak dalam kebijakan, terbukti efektif menurunkan penularan HIV. Partisipasi aktif komunitas meningkatkan kualitas layanan dan mengurangi stigma. Integrasi prinsip HAM menghasilkan sistem kesehatan yang lebih inklusif dan adil, sehingga reformasi kebijakan berbasis HAM menjadi strategi penting dalam pengendalian HIV.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrews, C. *et al.* (2020) 'Intimate partner violence, human rights violations, and HIV among women in Nairobi, Kenya', *Health and human rights*, 22(2), p. 155.
- Andrianto, M.B. (2021) 'Praktik Keagamaan pada Penderita HIV/AIDS', *Jurnal Kesmas Asclepius*, 3(1), pp. 34–40.
- Aswandi, B. and Roisah, K. (2019) 'Negara hukum dan demokrasi pancasila dalam kaitannya dengan hak asasi manusia (HAM)', *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(1), pp. 128–145.
- Ayres, J.R. (2023) 'Vulnerability, Care, and integrality: conceptual reconstructions and current challenges for HIV/AIDS care policies and practices', *Saúde em Debate*, 46, pp. 196–206.
- Bernard, E.J. *et al.* (2021) 'Ending unjust HIV criminalization: leave no-one behind', *Journal of the International AIDS Society*, 24(2), p. e25681.
- Beyrer, C. *et al.* (2024) 'Under threat: the International AIDS Society–Lancet Commission on health and human rights', *The Lancet*, 403(10434), pp. 1374–1418.
- Campbell, C. and Smith, D. (2022) 'Distinguishing Between Direct and Indirect Discrimination', *The Modern Law Review*, 86(2), pp. 307–330.
- Crabtree-Ramírez, B. *et al.* (2020) 'The HIV epidemic in Latin America: a time to reflect on the history of success and the challenges ahead', *Journal of the International AIDS Society*, 23(3), p. e25468.
- Das, P. and Horton, R. (2015) 'Bringing sex workers to the centre of the HIV response', *The Lancet*, 385(9962), pp. 3–4.
- Dunaway, K. *et al.* (2022) 'What will it take to achieve the sexual and reproductive health and rights of women living with HIV?', *Women's Health*, 18, p. 17455057221080360.
- Ehsanpour, S.R. dan Karami, H. (2020) 'Persyaratan hak asasi manusia terkait orang yang hidup dengan AIDS', *Seyyed Reza Ehsanpour*, 1(1), hlm. 65–77.
- Grubba, L.S. (2024) 'HIV/AIDS/SIDA (MVHA): revisão integrativa à luz dos direitos humanos', *Sequência (Florianópolis)*, 45(96), p. e97472.
- Gunawansyah, Yunindyawati and Sununianti, V.V. (2020) 'Diskriminasi Buruh Perempuan: Studi tentang Identifikasi Jenis dan Faktor Penyebabnya di Pabrik Tempe Kelurahan Timbangan Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir', *Jurnal Empirika*, 5(1), pp. 13-24.
- Kavanagh, M.M. *et al.* (2021) 'Law, criminalisation and HIV in the world: have countries that criminalise achieved more or less successful pandemic response?', *BMJ Global Health*, 6(8), pp. 1-8.
- Kumalasari, I., Chastanti, I. and Siregar, M.Y. (2020) 'Implementasi Kebijakan Harm Reduction untuk Meningkatkan Moral Knowing tentang Narkotika pada Siswa SMA di Kabupaten Labuhanbatu Utara, Sumatera Utara', *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 5(1), pp. 18-25.
- Kurniaty, R. (2021) 'Peraturan Kesehatan Internasional 2005: Perkembangan Substansial Untuk Hukum Internasional Dan Keamanan Kesehatan Global', *Masalah-Masalah Hukum*, 50(4), pp. 434–446.
- Leach, T. (2021) 'Human rights of people living with HIV, men with diverse sexualities and transgender women in PNG'. The Australian National University (Australia).
- Lin, Hsin-rou (2024) 'Refleksi tentang kesehatan masyarakat dan hak asasi manusia dalam kriminalisasi risiko AIDS: Tinjauan bukti empiris asing dan analisis keputusan pengadilan Taiwan.', *Jurnal Kesehatan Masyarakat Taiwan/Taiwan Gong Gong Wei Sheng Za Zhi*, 43(4).
- Mapiah, R.A. (2024) Upaya Kepolisian Resort Musi Rawas Utara dalam Meminimalisir

- Praktik Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Desa Batu Gajah Tahun 2023). Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
- Mykhalovskiy, E. *et al.* (2020) 'Human rights, public health and COVID-19 in Canada', *Canadian Journal of Public Health*, 111, pp. 975–979.
- Nursalam *et al.* (2021) 'Determinants of the Discriminatory Behavior Experienced by People Living with HIV in Indonesia: A Cross-sectional Study of the Demographic Health Survey', *The Open AIDS Journal*, 15, pp. 1–9.
- Parra-Barrera, S.M. *et al.* (2022) 'Protection of human rights and barriers for people with HIV/AIDS in Colombia: an analysis of the legal framework', *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(18), p. 11423.
- Perehudoff, K. *et al.* (2022) 'A comparative human rights analysis of laws and policies for adolescent contraception in Uganda and Kenya', *Reproductive Health*, 19(1), p. 37.
- Piot, P. *et al.* (2015) 'Defeating AIDS-Advancing Global Health', *The Lancet*, 386(9989), pp. 171–218.
- Putri, A. *et al.* (2023) 'Hak asasi manusia dalam perspektif Islam', *Al-Wasathiyah: Journal of Islamic Studies*, 2(2), pp. 195–208.
- Putrie, K.A. and Prasetya, B.E.A. (2021) 'Kecemasan terhadap Stigma Sosial untuk Kembali ke Masyarakat pada Mantan Narapidana Perempuan Tindak Pidana Penipuan', *Jurnal Ilmiah Bimbingan Konseling Undiksha*, 12(2), pp. 131–142.
- Sadarang, R.A.I. (2022) 'Prevalence and Factors Affecting Discrimination Towards People Living With HIV/AIDS in Indonesia', *Journal of Preventive Medicine & Public Health*, 55(2), pp. 205–212.
- Saputra, I.R. (2023) 'Dinamika Pekerjaan Seks Komersial: Infeksi menular seksual Sebagai Ancaman dan Strategi Pengurangannya', *Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM* [Preprint].
- Sekalala, S. and Esom, K. (2024) 'Law, Human Rights, and Pandemic Response: Reflecting on the South African HIV Response 25 Years Later', *Health and Human Rights*, 26(1), p. 21.
- Sircar, N.R., Saoyo, T.G. and Maleche, A.A. (2019) 'Assessing a human rights-based approach to HIV in Kenya', *Health and Human Rights*, 21(1), p. 267.
- Somse, P. and Eba, P.M. (2020) 'Lessons from HIV to guide COVID-19 responses in the Central African Republic', *Health and human rights*, 22(1), p. 371.
- Sudastri, N.K., Wulandari, L.P.L. and Januraga, P.P. (2025) 'Marking of HIV Stigma in Indonesia: A Scoping Review', *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 22(6), pp. 1–26.
- Tambunan, R. and Pratama, J. (2025) 'Peran Muhammadiyah dalam Menanggulangi Dampak Sosial LGBTQ+', *Masterpiece: Journal of Islamic Studies and Social Sciences*, 3(1), pp. 207–215.
- Wolfe, D. *et al.* (2015) 'Human rights and access to hepatitis C treatment for people who inject drugs', *International Journal of Drug Policy*, 26(11), pp. 1072–1080.